



**UPAYA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI  
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM REKRUTMEN  
PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

M. Iqbal Habibie

NIM. 3401407029

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sunarto, SH, M. Si  
NIP. 19630612 198601 1 002

Drs. Setiajid, M.Si  
NIP. 19600623 198901 1 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M. Pd  
NIP. 19610127 198601 1 001

## **PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Juli 2011

Penguji Skripsi

Martien Herna S.,S.Sos.,M.Si  
NIP. 19730331 200501 2 001

Penguji I

Drs. Sunarto, SH., M. Si  
NIP. 19630612 198601 1 002

Penguji II

Drs. Setiajid, M.Si  
NIP. 19600623 198901 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Subagyo, M.Pd  
NIP. 19510808 198003 1 003

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2011

M. Iqbal Habibie  
NIM. 3401407029

## SARI

**Habibie, Muhammad Iqbal.** 2011. *Upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Rekrutmen Pemilih Pemula Di Kabupaten Tegal*. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sunarto, M.Si, Pembimbing II Drs. Setiajid, M.Si. 89 hlm

**Kata kunci: Partai Politik, Rekrutmen, Pemilih Pemula**

Partai politik merupakan salah satu instrumen yang berperan penting guna memberikan penyadaran mengenai persoalan-persoalan bangsa dalam menumbuhkan kesadaran politik bagi warga negara. Salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai dan berpartisipasi aktif dalam politik. Pemilih pemula memiliki peran yang strategis, dimana kebanyakan pemilih pemula adalah kalangan pemuda yang mempunyai semangat tinggi dan mempunyai jiwa berjuang yang besar, untuk menjaga eksistensi partai, oleh karena itu partai politik merasa perlu merekrut pemilih pemula agar bisa menjaga eksistensi partainya, dan membentuk sikap kesadaran berbangsa dan bernegara bagi generasi muda. Rekrutmen pemilih pemula, juga dimaksudkan untuk menciptakan calon pemimpin-pemimpin bangsa dan negara.

Permasalahan penelitian ini adalah 1) bagaimana upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal, 2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal, dan 3) solusi apa yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi hambatan dalam rekrutmen anggota pemilih pemula.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal, bagi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal, dan sebagai bahan masukan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membuat kebijakan dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan rekrutmen anggota pemilih pemula atau anggota baru yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan dengan

kegiatan-kegiatan seperti, pelatihan-pelatihan, pengajian, seminar, *dauroh*, dialog, dan pertemuan lainnya, namun pendekatan yang lebih ditekankan adalah pendekatan personal, hal ini untuk menguatkan komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang tidak sepenuhnya diklasifikasikan sebagai partai massa, deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengatas namakan partai kader dan partai dakwah menunjukkan gabungan antara orientasi kaderisasi dan massa, dalam dakwah kader diwajibkan menyebarluaskan kepada masyarakat, sehingga lebih tepat dalam hasil penelitian ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diklasifikasikan partai berstandar ganda.

Saran dalam penelitian yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai politik lain, untuk senantiasa meningkatkan peran dan fungsinya, meningkatkan kualitas para kader dan simpatisan, serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk direkrut dan diberikan kesempatan untuk menjadi anggota partai atau menjadi kader partai, agar bisa berpartisipasi aktif dalam dunia politik.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

### **MOTTO**

- Semakin banyak yang anda inginkan akan semakin banyak yang hanya tinggal jadi keinginan. Fokus pada satu keinginan memungkinkan pencapaian banyak keinginan (Mario Teguh).
- Jangan mengabaikan hal-hal kecil jangan berhemat pada upaya ekstra (Og mondino).

### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ini kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya.
- Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan doanya yang tanpa lelah.
- Adikku, bulikku, kakek dan nenek, Yuyun Naelufar M, Dhifa Shohibul W, H. Syarifudin, dan Keluarga Noor Fadlilah yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat.
- Noor Fadlilah thanks buat semua cintanya yang selalu menemani disaat suka dan duka, serta selalu memotivasi saya agar menjadi lebih baik.
- Teman-teman seperjuangan PKn 2007, bahagia rasanya bersama dengan kalian.
- Almamaterku tercinta.

## **PRAKATA**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dukungan, saran, kritik serta segala bentuk bantuan yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Sunarto, SH.,M.Si Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Setiajid, M.Si Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah membekali ilmu dan motivasi penyusun untuk terus belajar.
7. Bapak Mustofa, S.PdI selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, Bapak M. Nuralim selaku Sekertaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, Bapak Amar Syamsi, Lc Ketua Bidang Kaderisasi Dewan

Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, Bapak Zafit Alfaizi Bidang Kerumah tanggaan Kearsipan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, dan pengurus lainnya, yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

8. Bapak, Ibukku tercinta terimakasih atas dukungan, doanya, motivasinya yang tanpa lelah serta keluarga yang telah memberikan cinta, kasih sayang, semangat, serta doa kepada penulis.
9. Saftian, Nova Ismanto, Riki, Nana, Lilik, Iing A, Anggi P, Lely, Oriyana, Musyarofah, Sovi N, terimakasih atas do'anya dan kebersamaan kalian, jangan pernah lupakanku.
10. Sahabat, dan teman-temanku di Kost Area 21 yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
11. Teman-teman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2007 FIS UNNES yang selalu memberikan bantuan dan motivasi selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2011

M. Iqbal Habibie

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SARI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	.8
F.Sistematika Penulisan Skripsi .....	11

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Partai Politik.....	13
B. Peranan dan Fungsi Partai Politik.....	14
C. Klasifikasi Partai.....	20
D. Sistem Kepartaian.....	22
E. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	25
F. Rekrutmen.....	27
G. Pemilih Pemula.....	31
H. Program Politik Partai.....	33

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Objek Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Validitas Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	46
1. Gambaran Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.....	46
a. Tinjauan Umum Tentang Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.....	46

b.	Visi dan Misi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.....	47
c.	Program Kerja Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.....	48
d.	Nama dan Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)....	57
e.	Struktur Organisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.....	58
f.	Sarana dan Prasarana Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.....	61
2.	Upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rekrutmen Pemilih Pemula di Kabupaten Tegal.....	61
3.	Faktor yang Mendukung dan Menghambat Dewan pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rekrutmen Pemilih Pemula di Kabupaten Tegal.....	73
4.	Solusi yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Menghadapi Hambatan dalam Rekrutmen Pemilih Pemula.....	75
B.	Pembahasan.....	76

## **BAB V PENUTUP**

1.	Simpulan.....	84
2.	Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Arti Lambang Partai.....	58

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 1. Proses Analisis Data.....	44
Gambar 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	50
Gambar 3. Alur Proses Rekrutmen Pemilih Pemula.....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 3 Instrumen Penelitian

Lampiran 4 Susunan Pengurus DPD PKS Kabupaten Tegal

Lampiran 5 Program Kerja DPD PKS Kabupaten Tegal

Lampiran 6 foto

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politik (*politics*) sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis, serta usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggotanya. Politik merupakan penyatuan suatu pendapat dan keinginan baik kelompok ataupun individu demi mewujudkan kepentingan bersama, yang menyangkut masalah konsep pokok politik yaitu mengenai negara (*State*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) (Budiardjo, 2008:15).

Sejak berdirinya republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi, namun dalam perjalanannya demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Setelah melewati masa penjajahan yang panjang, masyarakat Indonesia terutama kalangan terdidik bisa belajar mengenai konsep demokrasi. Para pendiri bangsa beranggapan bahwa bentuk negara

yang paling tepat untuk Indonesia adalah Republik Presidensial. Satu-satunya bentuk negara yang tepat adalah Republik. Setelah mengalami banyak kisruh politik yang kerap kali diwarnai pertumpahan darah, baru pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante (istilah MPR pada saat itu) (Firmanzah, 2007:10).

Indonesia dengan menganut sistem demokrasi, tidak bisa di pungkiri bahwa akan adanya sebuah pemilihan umum (pemilu). Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 pernah juga dilakukan pemilu multipartai, yang ketika itu diikuti oleh 36 partai politik (36 tanda gambar), baik yang mewakili partai maupun perorangan (Onghokham, 1995:222). Banyaknya partai politik ini, melambangkan sebuah negara yang demokratis, yang kemudian diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat yang beragam, serta penyeimbang kekuatan politik yang ada. Begitu juga dengan banyaknya partai politik, diharapkan menjadi lembaga kontrol terhadap pemerintah serta sebagai sarana mengkritik rezim yang berkuasa. Untuk itu kedudukan partai dalam kehidupan negara demokratis sangat penting sebagai infrastruktur sosial dan berfungsi sebagai kelengkapan utama dalam kehidupan bernegara.

Partai politik sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang mempunyai kekuatan politik ikut menentukan proses pembetukan kekuasaan pemerintahan secara legal, mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata melalui

partai politik. Partai politik sangat memerlukan pemilih atau pemilih pemula yang dijadikan sebagai pendukung setia partai, dalam klasifikasinya pemilih terbagi atas 4 (empat) kelompok pemilih, yaitu kelompok tradisional, modernisasi, dan paralel.

Hal ini berangkat dari sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing partai politik, pola dan isu gerakan yang digunakan serta platform partai yang diperjuangkan (Sandikota, 1999:12). Dari paparan di atas partai politik seharusnya mencermati mengenai karakteristik pemilih. Dalam merekrut anggota yang sebanyak-banyak partai harus memperhatikan empat kelompok pemilih tersebut, dimana setiap pemilih memiliki karakteristik dan ciri yang sangat berbeda diantara satu dengan lainnya. Selain itu, ideologi partai juga sangat berpengaruh dalam proses merekrut anggota. Untuk memperoleh anggota yang sebanyak-banyaknya partai harus bersifat terbuka mengenai visi, misi dan tujuan partai, dari situlah seorang pemilih akan tertarik terhadap partai tersebut.

Partai politik sangatlah perlu untuk merekrut anggota yang sebanyak-banyaknya guna menjaga kedudukan partai dan menjaga eksistensi partai tersebut, terutama partai massa yang lebih mengedepankan jumlah anggota atau pemilih yang sebanyak-banyaknya yang berasal dari berbagai aliran-aliran politik dalam masyarakat, ketimbang untuk mengkaderisasi anggotanya. Ini sebuah tantangan besar bagi partai kader yang mementingkan ketetapan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Selain merekrut anggota partai, pemilih pemula memiliki peran dan posisi yang

strategis, dimana pemilih pemula merupakan mangsa yang paling utama bagi partai-partai besar untuk menarik simpatinya guna menjadi anggotanya.

Peran pemilih pemula banyak memiliki peran di dalam pemilu. Sebagian besar pemilih pemula memiliki peran yang sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Rata-rata memiliki usia yang cukup muda dan memiliki dinamika yang cukup tinggi. Partisipasi pemilih pemula sebagian besar adalah berupa pemilih aktif dan bukan pemilih pasif. Pemilih aktif adalah pemilih yang peranya sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemilih pasif adalah orang yang dalam pemilu adalah merupakan orang yang dipilih.

Dasar memilih berupa hal-hal yang sifatnya emosional dan bukan berdasarkan visi dan misi calon atau partai yang dia dukung. Pemilih pemula banyak dimobilisasi dari semua kalangan kontestan. Hal ini akibat pendidikan politik yang kurang sejak masa Orde Baru yang terkenal dengan konsep depolitisasi. Karena depolitisasi ini memunculkan pobia di satu sisi dan eforia di satu sisi. Depolitisasi ini menyebabkan rendahnya kedewasaan politik rakyat terutama di kalangan pemilih pemula.

Berdasarkan peran pemilih pemula yang memiliki kedudukan sangat strategis baik dari kualitas maupun kuantitas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang notabnya sebagai partai kader lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja mempunyai andil yang sangat besar dalam merekrut pemilih pemula. Untuk itu menjadi tantangan yang besar bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut pemilih pemula dalam persaingannya dengan partai massa yang lebih mengutamakan kekuatan

jumlah anggotanya. Oleh karena itu diperlukan usaha yang optimal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut pemilih pemula yang masih minim dengan pengalaman dalam politik dan kondisi psikologis yang masih labil untuk menjadi anggota partai serta memperkuat kader-kader partai yang unggul dan kritis dalam menghadapi suatu persaingan yang sangat kuat di dalam perkembangan ideologi-ideologi yang bermacam-macam muncul dalam masyarakat modern sekarang.

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang sepanjang wilayahnya adalah pantai atau laut jawa dengan memiliki penduduk yang padat dan masyarakat yang heterogen. Kabupaten Tegal tidak jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang terletak di wilayah Jawa Tengah. Jumlah pemilih pemula pada pemilu Presiden (pilpres) 2009 di wilayah Kabupaten Tegal mencapai 8.303 orang (<http://www.kpu-kabupatentegal.or.id>. diakses pada 12:59, 19 April 2009). Data ini berdasarkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal. Kemudian data jumlah penduduk usia 17 tahun yang berKTP berdasarkan dari data demografi Kabupaten Tegal mencapai 125.300 orang (<http://www.tegal.go.id/page/demografi>. diakses pada 11:44, 26 Februari 2011). Berdasarkan dari data keduanya dimana pemilih pemula di daerah ini sangat minim bila dibandingkan dengan data demografi, banyak pemilih pemula memiliki hak pilih tetapi tidak memilih akibatnya banyak pemilih pemula yang acuh tak acuh pada suatu pemilihan umum atau pilkada, dan

kurangnya sosialisasi politik dari partai politik untuk merangkul pemilih pemula dalam berpolitik yang ada di Kabupaten Tegal. Dimana sering kali partai politik mengadakan sosialisasi politik pada saat menjelang pemilu atau pilkada.

Hal ini bisa menimbulkan anggapan atau statment negatif dari kalangan masyarakat khususnya pemilih pemula yang masih minim pengetahuan politik dan pengalaman dalam politik. Dengan minimnya pengetahuan tentang politik, pemilih pemula menjadi sasaran yang strategis untuk direkrut sebagai anggota partai politik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Partai politik memainkan perannya untuk merekrut anggota pemilih pemula sebagai regenerasi anggota partai politiknya, apalagi partai massa yang sangat membutuhkan jumlah massa yang besar ketimbang dengan partai kader, dan bagaimana upaya partai kader untuk merekrut anggota pemilih pemula khususnya di Kabupaten Tegal yang kondisi masyarakatnya sangat heterogen. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik ingin mengadakan penelitian dengan judul **“UPAYA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM REKRUTMEN PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN TEGAL”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu:

1. Bagaimana upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal?
3. Solusi apa yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi hambatan dalam rekrutmen pemilih pemula?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rekrumen pemilih pemula di Kabupaten Tegal.
3. Mengetahui solusi yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi hambatan dalam rekrutmen pemilih pemula.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya mengenai upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal.

2. Secara praktis

a. Bagi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal

Sebagai bahan masukan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membuat kebijakan dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai kontribusi positif mengenai politik dan wawasan politik untuk lebih berpartisipasi aktif dalam dunia politik.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan judul, Peneliti memberikan suatu batasan istilah yang terdapat dalam judul skripsi meliputi:

##### **1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal**

Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS merupakan partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas

dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan Sejahtera yang didirikan tanggal 20 April 2002, adalah kelanjutan Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998, yang pada saat itu anggotanya banyak di Jakarta, dan sekarang tersebar di seluruh Indonesia ([http://id.wikipedia.org/partai\\_keadilan\\_sejahtera](http://id.wikipedia.org/partai_keadilan_sejahtera).hal terakhir diubah pada 12:13, 16 Februari 2011).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal yang beralamat di jalan Gajah Mada Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal, 52183, Telepon 0283-6195304. Yang sekaligus menjadi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah lembaga eksekutif tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Kepengurusan dewan pengurus daerah terdiri atas:

- a. Seorang ketua umum;
- b. Beberapa Ketua bidang dan beberapa ketua badan;
- c. Seorang sekretaris umum dan beberapa wakil sekretaris umum;
- d. Seorang bendahara umum dan beberapa wakil bendahara umum;
- e. Beberapa bagian (Anggaran Rumah Tangga PKS, 2008:628).

## **2. Rekrutmen**

Rekrutmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan

berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi atau lembaga bersangkutan. Oleh karena itu jika sebuah organisasi atau lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu didasarkan pada kepentingan politik organisasi atau lembaga dan usaha itu disebut rekrutmen politik. Rekrutmen atau sistem rekrutmen, dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut (Firmazah, 2008 : 70).

Rekrutmen merupakan suatu proses mencari anggota atau dukungan yang sebanyak-banyaknya dari berbagai lapisan masyarakat yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dengan menggunakan cara atau pola yang berbeda untuk memperoleh calon anggota yang sebanyak-banyaknya.

### **3. Pemilih pemula**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin. Pemilih pemula adalah kaum remaja atau orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilih remaja yang wajib memilih usia 17 tahun atau sudah menikah.

Pemilih pemula adalah warga negara yang telah mempunyai hak memilih atau baru akan memilih pertama kali, yang berusia 17 tahun atau

lebih atau sudah atau pernah kawin, dan terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu atau pilkada dengan memberikan suara pertama kali sejak pemilu atau pilkada yang diselenggarakan di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

##### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal skripsi terdiri dari sampul berjudul, lembar berlogo (sebagai halaman pembatas), halaman judul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan (keaslian karya ilmiah), motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel (apabila ada), daftar gambar (apabila ada).

##### **2. Bagian Isi**

Pada bagian isi memuat lima bab yang terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan keadaan umum yang mewarnai masalah yang menjadi pokok penelitian yakni, 1) latar belakang, 2) perumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, 5) batasan istilah.

Bab II. Landasan Teori. Dalam bab ini berisi penjelasan konseptual tentang pokok-pokok kajian yang diambil dari beberapa sumber pustaka yang digunakan sebagai landasan atau dasar untuk membahas hasil penelitian

Bab III. Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai cara atau teknik atau lebih dikenal dengan istilah metode dalam pelaksanaan skripsi. Metode ini mencakup beberapa tahapan atau prosedur yang sistematis untuk mendapatkan data yang valid di lapangan. Tahapan atau bagian metode penelitian ini meliputi: 1) dasar penelitian, 2) fokus penelitian, 3) sumber data, 4) alat dan teknik pengumpulan data, 5) objektivitas dan keabsahan data, 6) prosedur dan tahapan penelitian, 7) model analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, kemudian akan diurai dan dianalisis dengan teori. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini meliputi: Upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Rekrutmen Pemilih Pemula di Kabupaten Tegal.

Bab V. Simpulan Dan Saran. Dalam Bab ini berisi simpulan dan saran hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi: Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Partai Politik

##### 1. Pengertian Partai Politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 1999:160). Untuk mempertegas mengenai pengertian partai politik, di bawah ini definisi mengenai partai politik yang dibuat para ahli ilmu politik:

- 1) Carl J. Fredric mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiardjo, 2008:404).
- 2) Giovanni Sartori mendefinifikan partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (Budiardjo, 2008:404).
- 3) Sigmund Neumann dalam karangannya *modern political parties* mengemukakan definisi sebagai berikut : partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Budiardjo, 2008:404).

Dari definisi tersebut di atas, maka pengertian partai politik merupakan perantara utama yang megkorelasikan kekuasaan dan ideologi-ideologi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga formal (pemerintahan). Partai politik berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat luas dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan-kebijakan publik.

## **B. Peranan dan Fungsi Partai Politik**

Di negara-negara yang sedang berkembang, partai politik mempunyai peranan yang terkait dengan identitas nasional. Di negara demokrasi, peranan partai politik sebagai berikut.

- a. Dalam proses pendidikan politik;
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat; dan
- d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat (Fadjar, 2008:21).

Dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi (Haryanto, 1982:89-96), sebagai berikut.

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik sebagai penghubung, maksudnya menghubungkan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Partai politik bertindak sebagai penghubung yang menampung

arus informasi, baik informasi yang berasal pihak penguasa kepada masyarakat maupun yang berasal dari masyarakat kepada pihak penguasa.

Dengan demikian terjadilah arus informasi bolak-balik, dari pihak penguasa kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pihak penguasa. Negara yang demokratis, komunikasi politik dapat berlangsung dua arah yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat maupun masyarakat kepada pihak pemerintah.

b. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat. Maka sudah sewajarnya jika partai politik mengaturnya sedemikian rupa agar semua pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat dapat tersalurkan.

Artikulasi kepentingan proses untuk mengolah dan kemudian merumuskan pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan dukungan. Agregasi kepentingan proses penggabungan tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan dan sikap-sikap dari berbagai kelompok yang terdapat di dalam masyarakat yang sedikit banyak mempunyai persamaan. Dalam suatu system politik, artikulasi dan agregasi kepentingan merupakan input yang disampaikan kepada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berwenang membuat keputusan atau kebijaksanaan yang mengikat, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, untuk kemudian diolah atau dikonversikan menjadi output dalam bentuk

peraturan-peraturan yang mengikat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya.

c. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik disamping menanamkan ideologi partai kepada para pendukungnya, harus pula mengajarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan politik yang berlaku dimasyarakatnya atau dinegaranya. Partai politik juga harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dan lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan sendiri atau golongan.

Dalam proses sosialisasi politik, maka cara yang biasanya dipergunakan oleh partai politik adalah dengan cara memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan maupun penataran-penataran tentang politik. di negara-negara demokratis partai politik berperan untuk menyelenggarakan integrasi warga negara kedalam masyarakat umum.

d. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik dalam fungsi ini adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin. Pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah dengan menarik golongan muda untuk di didik dijadikan kader dan dari para kader ini akan nampak anggota-anggotanya yang mempunyai bakat yang pada gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin.

Partai yang mempunyai paham demokratis akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para warga negara untuk masuk menjadi anggota partai. Partai yang mempunyai paham demokratis ini dalam merekrut anggotanya juga melalui persaingan dengan partai-partai lain yang terdapat di masyarakat atau negara tersebut.

e. Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan

Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan apabila partai tersebut merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan secara mayoritas mutlak. Apabila partai tersebut hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, maka partai tersebut tidak merupakan sarana pembuatan kebijaksanaan akan tetapi sebagai pengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

f. Partai politik sebagai sarana pengantar konflik

Negara-negara yang menganut paham demokratis perbedaan pendapat dan persaingan diantara para warga negara atau golongan-golongan yang ada memang sering muncul. Perbedaan pendapat dan persaingan tersebut sering mengakibatkan terjadinya konflik-konflik atau pertentangan-pertentangan diantara mereka. Partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat, persaingan atau bahkan konflik-konflik yang terjadi, sehingga akibat yang ditimbulkannya tidak akan merusak integrasi nasional yang telah dibangun. sebaliknya apabila partai politik justru mempertajam perbedaan pendapat, persaingan atau konflik yang

berlangsung dimasyarakat maka akibatnya integrasi nasional dapat terancam menjadi goyah.

Fungsi partai politik menurut Firmanzah (2007:88), yaitu sebagai berikut:

a. Partai politik sebagai agen sosial

Dalam sistem politik seperti sekarang ini, peranan partai politik menjadi sangat vital. Kader-kader partai politiklah yang banyak mewarnai kebijakan melalui wakil-wakil yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Dengan begitu besarnya akses yang dimiliki partai politik, muncul juga tanggung jawab social yang harus diemban. Mengingat peranannya yang begitu besar, tidak mengherankan apabila dituntut tanggung jawab partai yang besar juga. Partai politik semakin di tuntut sebagai agen sosial yang berperan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Partai politik sebagai pelayan publik

Partai politik harus dilihat sebagai entitas yang dibebani kewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui perjuangan ideologi mereka yang tercermin dalam program kerja dan platform partai. Menjadi pelayan publik berarti bahwa keberadaan partai politik dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas, bangsa dan negara. Hal-hal yang akan dilakukan oleh partai politik harus berorientasi pada perbaikan kondisi sosial masyarakat, dan tidak hanya terfokus pada apa yang

dirasakan benar oleh partai politik tersebut. Partai politik harus selalu hadir untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi publik.

c. Partai politik sebagai agen pembaharuan

Partai politik juga dituntut tidak semata-mata mengikuti apa yang dimau masyarakat. Lebih dari itu, partai politik diharapkan memiliki visi dan tujuan jangka panjang yang jelas tentang mau dibawa ke manakah rakyat dan mau ke manakah bangsa serta negara dikembangkan.

d. Partai politik sebagai harapan sosial

Dengan melihat apa yang dapat dilakukan partai politik untuk mempengaruhi kebijakan publik, sangat wajar kalau harapan yang diberikan masyarakat kepada partai politik sangat besar. Masyarakat berharap bahwa partai politik dapat membawakan perbaikan bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, fungsi partai politik sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan beramasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan rakyat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

### C. Klasifikasi Partai

Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu *partai massa* dan *partai kader*. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing, aliran atau kelompok yang bernaung dibawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.

Partai kader mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan (Budiardjo, 2004:166). Dilihat dari definisi di atas sangat berbeda sekali diantara keduanya, dimana suatu partai politik memiliki

klasifikasi partai yang berbeda baik dari segi komposisi maupun fungsi keanggotaannya, begitu juga dengan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi.

Partai politik pada umumnya dapat di kalsifikasikan menurut tiga kriteria (Kantaprawira, 2002:67).

a. Berdasarkan komposisi dan keanggotaanya

Berdasarkan komposisi dan keanggotaanya secara umum partai politik dibagi dalam dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, sedangkan partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.

b. Berdasarkan sifat dan orientasinya

Klasifikasi ini membagi partai menjadi dua jenis, yaitu partai lindungan (*patronage party*) dan partai ideologi atau partai azas (*weltanschauungs partie*)

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekali pun organisasi di tingkat local sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Partai ideologi atau partai azas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

c. Berdasarkan sistem kepartaian

Secara konvensional, dikenal tiga sistem klasifikasi sistem kepartaian. Pertama, sistem satu partai (*one party system*). Dalam suatu

negara hanya ada satu partai, atau dalam suatu negara sebenarnya terdapat partai-partai lain, namun karena terlalu kecilnya partai-partai tersebut, hanya satu partai yang dominan dalam politiknya.

*Kedua*, sistem dwi partai, yaitu dalam suatu negara terdapat dua partai. Dalam system ini biasanya partai yang menang dalam pemilihan umum menduduki posisi pemerintahan (berkuasa). Sebaliknya partai yang kalah menjadi oposisi setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang berkuasa.

*Ketiga* sistem banyak partai (*multy party system*). Dimaksudkan bahwa di suatu Negara terdapat banyak partai, tidak terpengaruh berapa jumlah partai dan partai mana yang berkuasa.

#### **D. Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian (*party systems*) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *political parties*. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, sistem multi-partai.

##### **1. Sistem Partai-Tunggal**

Ada sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai-tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradiction in terminis*) sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (*pars*). Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar

merupakan satu-satunya partai dalam suatu Negara maupun partai yang kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.

Dalam kategori terakhir terdapat variasi. Pola partai-tunggal terdapat di beberapa negara: Afrika, China, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya (Budiardjo, 2008:415).

## 2. Sistem Partai Dwi-Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas *Anglo Saxon*.

Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam

pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan sering dinamakan pemilih terapung (*floating vote*) atau pemilih di tengah (*median vote*). Sistem dwi-partai pernah disebut *a convensient system contented people* dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogeny (*social homogeneity*), adanya konsesus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan social dan politik (*political consesus*), dan adanya kontinuitas sejarah (*historial continuity*) (Budiardjo, 2008:416).

### 3. Sistem Multi-Partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah system multi-partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (*primordial*) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai. Sistem multi-partai ditemukan anantara lain di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia.

Sistem multi-partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislative, sehingga peran badan

eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain (Budiardjo, 2008:418).

## **E. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

### **1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat menjadi PKS merupakan partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan.

Partai Keadilan secara resmi didirikan pada 20 juli 1998. Islam menjadi asas partai baru ini, tercatat lebih dari 50 pendiri partai ini, diantaranya adalah Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaq, Salim Segar Aljuari dan Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi Ismail menjabat sebagai pimpinan partai keadilan, sedangkan Hidayat Nur wahid menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan partai. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di masjid Al Azhar kebayoran Baru Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 50.000 massa. Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS merupakan partai berasaskan islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan Sejahtera yang didirikan tanggal 20 April 2002,

adalah kelanjutan partai keadilan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki Visi Umum sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.

Visi khusus yaitu partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Dengan bekal visi itu, partai ini mendasarkan prinsip kebijakannya sebagai partai dakwah artinya dakwah menjadi poros utama seluruh gerak partai, sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Dalam verifikasi faktual oleh KPU, partai ini lolos di semua provinsi yang diajukan. Pada saat ini merupakan salah satu partai besar di Indonesia ([http://id.wikipedia.org/partai\\_keadilan\\_sejahtera](http://id.wikipedia.org/partai_keadilan_sejahtera). hal terakhir diubah pada 12:13, 16 Februari 2011).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai prinsip bahwa Islam adalah sistem hidup yang universal, menyangkup seluruh aspek kehidupan, Islam adalah negara dan tanah air pemerintahan dan umat, kebudayaan dan perundang-undangan, moral dan kekuasaan, rahmat dan keadilan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, aqidah yang lurus dan ibadah yang benar (Kamarudin, 2003:73). Namun di sisi yang lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang mempunyai kecenderungan perwujudan dari realitas politik aliran yaitu Islam, padahal masih ada pandangan, bahwa pilihan

politik berdasarkan aliran ini mengidentifikasi bahan pendidikan politik bagi generasi muda sekarang ini kurang memadai, selain sebagai partai dakwah yang bercorak Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai kader dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan, dilihat dari klasifikasi partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai tantangan yang sangat besar dalam memperoleh dukungan atau merekrut anggota, karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang notabnya partai kader harus bersaing dengan partai massa yang lebih mementingkan kekuatan jumlah anggota partai.

#### **F. Rekrutmen**

Partai politik merupakan aktor utama dari sebuah negara demokrasi, karena partai politik di sini sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah maupun wakil-wakil rakyat agar dapat menjadi kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kepemimpinan suatu pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting karena pemimpin akan memimpin orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi atau badan untuk bekerja dalam organisasi tersebut sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Pemimpin akan mengorganisir organisasi tersebut agar tetap eksis, begitu juga dalam

sebuah partai politik, fungsi seorang pemimpin sangatlah penting dalam setiap mengambil kebijakan. Keberhasilan sebuah partai politik dalam pemilu maupun kehidupan politik nasional juga tidak terlepas dari peran serta pengurus dan kaderpartai yang berada di tiap daerah, pengurus dan kader ini merupakan orang-orang pilihan yang akan bekerja untuk membangun partainya agar menjadi partai yang besar.

Pengurus dan kader ini tidak selamanya mereka akan berada dalam suatu partai politik. Suatu saat dengan berbagai hal pengurus dan kader tidak selamanya menjadi anggota atau bagian dari suatu partai politik. Hal ini disebabkan misalnya keluar dari partai dan bergabung dengan partai lain, diberhentikan karena melanggar kode etik atau berhenti karena usianya telah lanjut usia, sehingga tidak mampu lagi untuk membangun partai. Pengurus juga bisa bertambah karena adanya perluasan lingkup bidang.

Partai akan melakukan perekrutan terhadap anggota serta pemilihan pengurus guna menggantikan kepengurusan yang lama. Partai mencari kader-kader baru untuk bisa bergabung. Oleh karena itu fungsi partai sebagai rekrutmen politik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk regenerasi demi keberlangsungan sebuah partai ke depannya dan menjaga eksistensi partai dalam kehidupan politik. Rekrutmen tidak hanya terjadi pada partai politik, akan tetapi lembaga-lembaga juga melakukan rekrutmen guna regenerasi.

Philip Althof dan Michael Rush dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik (2000) menyebutkan bahwa Perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik, bisa dilakukan dengan menduduki jabatan politik seperti perdana menteri atau presiden, anggota pemerintah atau menjabat gubernur negara bagian, anggota Dewan Kotapraja setempat atau Walikota, ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai negeri sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demikian pula, perhatian tersebut jadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter.

Pola rekrutmen yang diterapkan gerakan tarbiyah mulai dari rekrutmen individu (*rekrutmen fardi*), yaitu rekrutmen satu atau dua orang anggota dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau rekomendasi murrabi. Disamping juga terbuka peluang untuk melakukan rekrutmen kolektif (*rekrutmen jama'i*). Rekrutmen ini dilakukan baik menggunakan sarana formal maupun informal.

Rekrutmen *jama'i* terutama melalui rekrutmen kepartaian, organisasi massa maupun organisasi agama tertentu, untuk pola rekrutmen kepartaian dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat melalui kegiatan formal kepartaian untuk menjadi anggota dan simpatisan partai (Edward, 2006:18).

Rekrutmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat

non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi/lembaga bersangkutan. Oleh karena itu jika sebuah organisasi/lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu didasarkan pada kepentingan politik organisasi/lembaga dan usaha itu disebut rekrutmen politik.

Rekrutmen atau sistem rekrutmen, dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut (Firmazah, 2008:70). Dengan demikian rekrutmen merupakan suatu sistem dari berpolitik yang salah satunya adalah strategi politik dari suatu partai politik untuk merekrut anggota baik secara individu maupun kelompok atau organisasi dengan melalui ketentuan-ketentuan partai dan juga melalui proses-proses yang ada dalam partai tersebut. Dari definisi-definisi di atas maka pengertian dari rekrutmen politik adalah proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik atau lembaga politik untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

## G. Pemilih Pemula

Anggota pemilih atau pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Dengan kata lain partai politik harus memiliki basis pendukung yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan politik (Firmanzah, 2007:102).

Pemilih pemula adalah warga negara yang telah mempunyai hak memilih atau baru memiliki hak memilih untuk pertama kali, yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin, dan terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Pemilih pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setelah lulus mengikuti *Training* Orientasi Partai I (satu) (Edward, 2006:19).

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh

penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara setelah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin. Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam pesta demokrasi (pemilu legislatif, pilpres dan pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

- a. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin.
- b. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu atau pilkada yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
- c. Mempunyai hak memilih dalam menyelenggarakan pemilu atau pilkada.

## H. Program Politik Partai

Dalam hubungan relasional terdapat interaksi dan komunikasi dua arah atau '*dyadic*' (Barry & Crant; Lindberg-Repo & Gronroos, 2004). Berpolitik berarti menjual ide dan gagasan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam era masa kini, menjual ide dan gagasan berarti mempunyai program kerja yang bisa diterima rakyat, lebih lanjut lagi, untuk dapat menyusun program kerja yang akurat, partai politik tidak dapat bekerja sendirian, terlepas dari akarnya di masyarakat. Partai politik tidak dapat menyusun suatu program kerja yang komprehensif dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat luas tanpa melibatkan sama sekali masyarakat itu sendiri dalam menyusun programnya. Proses pelibatan dapat dilakukan dua cara, yaitu langsung ataupun tidak langsung. Melibatkan konstituen secara langsung misalnya dengan mengajak mereka berdialog, observasi langsung ke lapangan, diskusi, tatap muka dan hadir di tengah-tengah keresahan masyarakat. Proses ini akan memberikan citra positif bahwa partai politik tersebut sangat peduli dengan ikut serta merasakannya secara langsung. Program kerja hanya dapat dibangun secara akurat dengan melibatkan orang-orang yang terkena dampak suatu permasalahan bangsa dan negara secara langsung maupun tak langsung (Firmanzah, 2007:72).

Program politik sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional, dan terkait-baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam

merebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik ini perlu dikomunikasikan kepada publik, yang membedakan antara satu partai dengan partai yang lainnya, adalah ideologi yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun program politik, masing-masing partai politik memiliki sistem ideologi yang berbeda satu dengan lainnya (Firmanzah, 2008:72).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini data hasil penelitian berupa data deskriptif yang tidak dihitung menggunakan rumus-rumus statistik. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas, terinci dan ilmiah (Moleong, 2007:7).

Penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mengkaji atau meneliti serta mengungkap persoalan mengenai upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal, faktor pendukung dan penghambat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula dan solusi apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk rekrutmen pemilih pemula, yang kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh terkait dalam beberapa hal sehingga pada akhirnya nanti peneliti akan mendapatkan data yang utuh dalam menunjang penelitian yang ingin dicapai. Pengumpulan data berdasarkan pendekatan kualitatif ini akan dilakukan dalam tahapan teknik dan pengumpulan data melalui teknik wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi.

## **B. Objek Penelitian**

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beralamat di Jalan Gajah Mada Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal, 52183 Telepon 0283-6195304, email: pks sejahtera\_slawi@yahoo.co.id.

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. Upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal.
- b. Faktor pendukung dan penghambat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal.
- c. Solusi apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi hambatan dalam rekrutmen pemilih pemula.

## **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2007:157) sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data sekunder seperti dokumen dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk

penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.
- 2) Sekertaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.
- 3) Ketua Bidang Pembinaan Kader Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti yang terdahulu (Moleong, 2002:157). Untuk penelitian ini data sekundernya berupa buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang terkait dengan partai politik dan pemilih pemula, artikel-artikel yang terkait dengan partai politik dan pemilih pemula, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Metode Wawancara

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan metode wawancara teknik komunikasi langsung yang berbentuk wawancara tak berstruktur. Pelaksanaan tanya-jawab dalam wawancara ini mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara tak berstruktur ini biasanya berjalan lama dan sering kali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya (Moleong, 2007:191). Dalam penelitian orang yang diwawancarai atau nara sumbernya yaitu Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal; Sekertaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, dan Ketua Bidang pembinaan Kader Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.

Wawancara digunakan untuk mengungkap data dan informasi yang akurat tentang upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut anggota pemilih pemula di Kabupaten Tegal dan Faktor pendukung dan penghambat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut pemilih pemula di Kabupaten Tegal serta solusi apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengatasinya. Data apa yang diungkap ialah mengenai, cara merekrut yang berdasarkan aturan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, serta informasi yang didapat ialah bagaimana proses merekrut atau perekrutan anggota pemilih pemula Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Tegal yang dari berbagai latar belakang masyarakat, dan

informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, dan Ketua Bidang Pembinaan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.

## 2. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan dikaji, dalam hal ini berarti peneliti terjun langsung dalam lingkungan masyarakat (Moleong, 2007:174). Dalam penelitian ini, Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal. Observasi yang peneliti lakukan mencakup beberapa hal, yaitu meliputi upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merekrut pemilih pemula, apa faktor pendukung dan penghambat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut pemilih pemula dan solusi apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rekrutmen pemilih pemula. Dalam observasi atau pengamatan ini yang akan diamati bagaimana metode dan proses perekrutan pemilih pemula Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Tegal.

Data yang akan di peroleh dari observasi atau pengamatan ini adalah mengenai tempat perekrutan, tata cara merekrut yang berdasarkan aturan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, siapa yang berhak merekrut pemilih pemula, berapa kali proses perekrutan pemilih pemula dilakukan, cara merekrut pemilih pemula, dan jumlah yang akan

direkrut dalam setiap merekrut atau perekrutan menjadi pemilih pemula. Dengan terjun langsung ketempat pengamatan atau observasi agar dapat memperoleh data yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumen dan record digunakan untuk keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln (198:235) dalam bukunya Moleong (2007:217), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti sebagai berikut:

- a) Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang ilmiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d) *Record relative* murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- e) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar untuk ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah gambar-gambar proses perekrutan pemilih pemula Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan gambar-gambar kegiatan yang ada dalam rekrutmen pemilih pemula.

#### **F. Validitas Data**

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penerapan kriterium derajat kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kreterium ini berfungsi: *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai; *kedua* mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2002:178).

Untuk menetapkan keabsahan dalam penelitian yaitu dengan keikutsertaan penelitian di lapangan, dalam hal ini peneliti ikut terjun langsung ke lokasi untuk mempelajari banyak hal mengenai upaya-upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merekrut pemilih pemula di Kabupaten Tegal guna memperoleh data secara riil. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan (Moleong, 2002:176).

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data (Moleong, 2007:248). Dalam hipotesis penelitian ini, yaitu upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula, cara apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula, dan upaya apa saja yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengatasi faktor penghambat dan pendukung dalam rekrutmen pemilih pemula, serta solusi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutment pemilih pemula.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data-data yang di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data

yang valid. Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis. Sedangkan data yang tidak perlu akan digunakan kembali.

Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang telah didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih umum kemudian disederhanakan difokuskan kembali dalam permasalahan utama penelitian.

#### b. Sajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk *matrik, network, cart* atau *grafis*, sehingga peneliti dapat menguasai data.

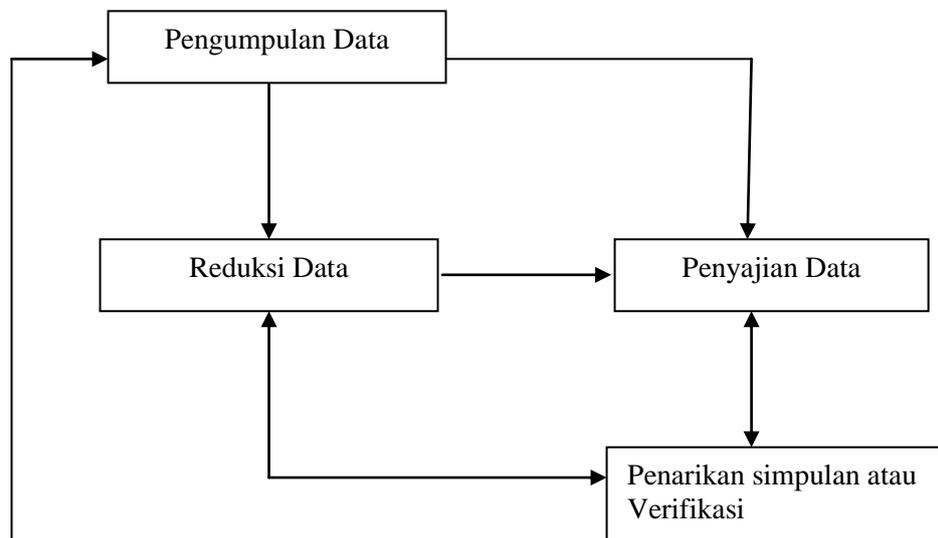
#### c. Kesimpulan

Yaitu menarik kesimpulan dari semua hal yang ada dalam reduksi data maupun sajian data kesimpulan yang diambil benar dan kokoh (Miles, Matthew B & A. Michael Huberman, 1992:18).

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan.

Keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut

**Gambar 1.** Proses Analisis Data



Keempat analisis data model interaktif (Miles, 1992:20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal**

Hasil penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran umum mengenai kondisi Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gambaran umum ini meliputi tinjauan umum tentang Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), visi-misi, nama dan lambang, struktur organisasi, sarana dan prasarana.

##### **a. Tinjauan Umum tentang Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal**

Dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) BAB XI Dewan Pengurus Daerah pasal 17 ayat 2 menyebutkan dewan pengurus tingkat daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, merupakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pengurus Daerah adalah ketua majelis pertimbangan daerah.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, menaungi Dewan Pengurus Ranting yang berada dalam kekuasaannya, Dewan Pengurus Ranting merupakan kepengurusan partai pada tingkat kecamatan, yang terdiri dari 18 Dewan Pengurus Ranting yang ada di Kabupaten Tegal, yang di

bawahnya menaungi Dewan Pengurus Ranting yang kepengurusannya berada pada tingkat desa atau kelurahan.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal berdiri sejak tanggal 24 April 2004, jadi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal sudah berusia 7 tahun.

**b. Visi dan Misi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal**

Visi umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah “sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa” sedangkan visi khusus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal adalah “Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”. Indikator visi tersebut adalah:

- 1) Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
- 3) Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil alamin*.
- 4) Akselelator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi di atas, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal mengembangkan misi (Platform Kebijakan Pembangunan PKS, 2008:1) sebagai berikut:

- 1) Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir* (pembeda).
- 2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islam di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* (pengumpulan data) dan pusat solusi.
- 3) Membangun opini umum yang Islam dan Iklm yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa *rahmat*.
- 4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- 5) Menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- 6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah (pertemuan) dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

**c. Program Kerja Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal**

Dalam mencapai visi dan misi di atas, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal mengembang misi, yaitu yang diterjemahkan dalam program-program partai dengan

melalui bidang-bidangnya, dalam penelitian ini program kerja yang dijabarkan yaitu yang berkaitan dengan penelitian dan judul. Program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal diantaranya sebagai berikut:

1) Program kerja bidang kaderisasi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal Tahun 2010

a) Nama program: peningkatan mutu pengelolaan pelaksanaan *tarbiyah*, tujuannya penyelenggaraan *dauroh murabbi* atau pelatihan menjadi Pembina dengan tujuan agar setiap kader dan simpatisan bisa menjadi *murabbi* atau Pembina dengan sarannya yaitu anggota baru dan masyarakat umum.

b) Nama program: peningkatan efektivitas pengelolaan wasail at *tarbiyah* atau peningkatan efektivitas pengelolaan perekrutan dan pendidikan, tujuannya untuk melaksanakan *dauroh* (pelatihan) rekrutmen anggota baru, penyelenggaraan *tatsqif* merupakan program tentang peningkatan dan pemahaman islam dan mengenai partai itu sendiri sarannya kader, simpatisan dan anggota baru, pelaksanaan *mabit* yaitu pelaksanaan malam bina iman dan taqwa yang sarannya adalah ikatan remaja masjid dan para pemuda, pelaksanaan *lailatul katibah* yaitu malam bina iman, taqwa dan bermalam bersama di musola yang sarannya adalah ikatan remaja masjid dan masyarakat umum, pelaksanaan *jalsah ruhiyyah* merupakan program peningkatan rohani dengan

sasarannya kader dan simpatisan, *mutabaah syiar tarbiyah* dan tindak lanjut, penyelenggaraan *dauroh* merupakan program penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan mengaji, pelatihan menjadi *murabbi* atau Pembina, pelatihan komputer dan sebagainya.

- c) Nama program: peningkatan disiplin penerapan *manhaj* (sistem), tujuannya untuk penyelenggaraan program *khotmil al-quran* merupakan program mengaji al-quran sampai khatam atau selesai dengan dipimpin oleh seorang guru ngaji sarasannya untuk para kader, simpatisan, pemuda dan masyarakat umum, pengguliran *ansyithoh ramadhan* (penyambutan bulan ramadhan atau puasa) biasanya diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bulan ramadhan atau Islami, misalnya syukuran unggah-unggahan yang dilakukan oleh pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal.
- d) Nama program: peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen struktur pembinaan kader, tujuannya untuk sarasehan atau sillaturohmi pembinaan kader, *jaulah* (mengunjungi) DPC merupakan mengunjungi atau sillaturohmi dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC), raker kaderisasi, *jaulah* (mengunjungi) mengenai evaluasi pembinaan ke Dewan Pengurus Ranting

(DPRa), evaluasi dan pendataan masalah-masalah kaderisasi dan solusinya.

e) Nama program: pembentukan keluarga kader yang kokoh sebagai basis penegakan nilai-nilai Islam di masyarakat basis rekrutmen dan basis pembinaan, tujuannya untuk pembuatan profil dan problematika keluarga kader, pemetaan masalah-masalah keluarga kader, usaha-usaha penyelesaian masalah-masalah keluarga kader, sosialisasi *manhaj* (sistem) keluarga dan konsep keluarga dakwah melalui sarana *tarbiyyah* (pendidikan), dan pelaksanaan *syahru maknawi*, *syahru fikri* dan *syahru suluki* atau pelaksanaan peningkatan rohani, peningkatan berfikir, dan peningkatan akhlak, sasarannya yaitu kader, simpatisan dan anggota baru, agar memiliki sikap dan sifat yang menjadi tujuan dari program tersebut.

f) Nama program: melaksanakan tugas administrasi, tujuannya untuk pencatatan dan pendistribusian hasil rapat, mengarsipkan surat menyurat, menyiapkan laporan, pendataan berkala, dan mendokumentasi setiap kegiatan.

2) Program kerja bidang politik dan hukum Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal Tahun 2010

a) Nama program: orientasi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab bidang politik dan hukum, tujuannya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya pada setiap bidang.

- b) Nama program: optimalisasi program kerja bidang politik dan hukum DPD dan DPC, tujuannya untuk koordinasi bidang politik dan hukum pada setiap pengurus.
- 3) Program kerja kewanitaan atau perempuan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal Tahun 2010
- a) Nama program: pendataan update data, optimalisasi pemanfaatan lembaga strategis untuk pemunculan tokoh dan penguatan jaringan, optimalisasi pemanfaatan media internal untuk pengokohan tokoh dan kader wanita, penjagaan kemampuan analisis kritis *akhowat* PKS, pelatihan manajemen, kontroling dan akreditasi, sosialisasi konsep PKS dalam isu-isu wanita, anak, dan keluarga, penyiapan bakal calon wanita, pengokohan struktur kewanitaan sampai Dewan Pengurus Ranting (DPRa), dan penyiapan sukses dan regenerasi bidang kewanitaan DPD kewanitaan DPD Kabupaten Tegal.
- 4) Program kerja bidang generasi muda dan profesi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal Tahun 2010
- a) Nama program: pembentukan struktur kepeloporan pemuda, tujuannya, terekrutnya pengurus baru, sasarannya pemuda.
- b) Nama program: pembentukan forum remaja masjid, tujuannya terekrutnya kader baru, sasarannya remaja masjid.

- c) Nama program: pembentukan forum karang taruna, tujuannya silaturahmi, sasarannya pengurus karang taruna.
  - d) Nama program: menumbuhkan wawasan, peran dan potensi pemuda, tujuannya memberikan peran dan potensi generasi muda.
  - e) Nama program : menumbuhkembangkan peran dan potensi remaja masjid, tujuannya meningkatkan peran remaja masjid, sasarannya ta'mir masjid dan remaja masjid.
  - f) Nama program: pembentukan gema keadilan, tujuannya terbentuknya gema keadilan di Kabupaten Tegal.
  - g) Nama program: dakwah pemuda lingkungan, tujuannya terekrutnya kader baru, sasarannya pemuda dan remaja.
- 5) Program kerja bidang kepanduan dan olahraga (bagian olahraga) Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal Tahun 2010
- a) Nama program: pembentukan struktur, tujuannya agar seluruh kegiatan tertata rapi, sasarannya kader.
  - b) Nama program: membentuk team kebugaran atau senam PKS bersatu, tujuannya agar seluruh kader dan simpatisan badan menjadi sehat, sasarannya kader dan simpatisan.
  - c) Nama program: lari pagi satu pekan, tujuannya agar seluruh kader dan simpatisan badan menjadi sehat, sasarannya kader dan simpatisan.

- d) Nama program: renang sepekan satu kali, tujuannya agar seluruh kader dan simpatisan badan menjadi sehat, sasaranya kader dan simpatisan.
- e) Nama program: lintas alam akhwat, tujuannya agar akhwat atau ummahat merasakan betapa indahny alam, sasarannya kader dan simpatisan.
- f) Nama program: bulu tangkis, tujuannya agar seluruh kader dan simpatisan badan menjadi sehat, sasaranya kader dan simpatisan.
- g) Nama program: SOB atau sehari olahraga bersama, tujuannya mempererat ukhuwah kader, sasaranya kader.
- h) Nama program: sepak bola, tujuannya agar seluruh kader dan simpatisan badan menjadi sehat, sasaranya kader dan simpatisan.
- i) Nama program: MPKDI, tujuannya membentuk kader yang sehat dan bugar, sasaranya kader.
- j) Nama program: MPKDII, tujuannya kekuatan, skill, dan rekreasi, sasaranya kader.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal merupakan kepengurusan pimpinan partai tingkat kabupaten. Melalui Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami perubahan yang didalamnya menyelenggarakan rekrutmen anggota baru, kaderisasi, pendidikan, pelatihan, kursus-kursus da'wah, dan kepemimpinan. Dewan Pengurus

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal bagi beberapa kalangan kader dikenal sebagai partai yang memiliki program yang ideal dalam arti sesuai dengan perkembangan jaman, selain memiliki peran dan fungsi kepartaian pada umumnya, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal juga senantiasa memperhatikan tingkat kualitas kader.

Terlebih dengan partai yang berazaskan Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pergerakannya tidak lepas dari agama Islam itu sendiri, dan beraliran agamis. Tentunya mensyaratkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus benar-benar mampu menyelaraskan visi misinya, sehingga seimbang antara kepentingan partai dengan kepentingan kader, atau kepentingan pengurus partai (elit politik) dengan para kader-kadernya ataupun simpatisan. Pada hakikatnya perhatian terhadap peningkatan kualitas antara partai dan kader terjadi melalui hubungan dua arah yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, yaitu partai demi mencapai tujuannya memerlukan wujud konsistensi dan loyalitas yang besar dari para kader partainya, begitu juga dengan kader yang bersangkutan, tentunya kader juga mengharapkan manfaat yang baik dan memberikan kontribusi yang positif dari keterlibatannya dengan partai tersebut. Dari tangan para kaderlah partai akan menjadi besar dan memiliki pendukung yang banyak jika kader tersebut konsisten dan tanggung jawab akan

tugasnya, begitu juga sebaliknya jika kader acuh tak acuh partai akan kekurangan pendukung atau massa.

Upaya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal dalam melebarkan sayapnya atau kontribusinya tidak hanya dilakukan dengan jalur politik praktis, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan berbagai langkah aktif partai, yaitu salah satunya dengan memberikan kontribusi dan perhatian yang besar kepada masyarakat umum, kongkritnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepadanya, contohnya donor darah, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya, karena pada masyarakat umumlah khususnya pemuda akan membangkitkan kemajuan dan menggali semua potensi yang ada dalam partai dan pemuda-pemuda yang loyal. Pernyataan pengurus menunjukkan bahwa Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, dalam tujuannya adalah mengarahkan pembentukan perilaku politik yang moralitas, santun, mempunyai *aqidah*, memiliki keimanan dan ketaqwaan melalui adanya aktivitas ibadah dan memberikan ilmunya untuk orang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketua DPD, sekretaris DPD, dan sekretaris harian DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, terdapat program kegiatan yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal dalam rekrutmen pemilih

pemula yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi serta kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tujuannya agar masyarakat dapat tertarik dan akan antusias mengikuti kegiatan tersebut, dan bermanfaat bagi semuanya.

**d. Nama dan Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Nama sebuah partai politik dan juga lambangnya tentu saja mempunyai arti dan landasan filosofi yang dalam, begitu juga dengan nama dan lambing Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nama keadilan dipakai bagi partai ini bukan tanpa nama, namun keadilan dipakai sebagai *sunnah kauniah* (data atau dalil-dalil penguat pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya) yang menjadi ciri dari segala sesuatu.

Kalangan Partai Keadilan sejahtera (PKS) mendefinisikan keadilan ialah meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas, sebab melampaui batas adalah dosa dan perkataan setinggi-tingginya. Keadilan adalah akidah dalam mengakui ke-Esaan Allah, hak-Nya untuk disembah bukan ditentang, disyukuri bukan diingkari, untuk diingat bukan dilupakan.

Sejahtera bukan hanya menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapat hak-hak asasinya sebagai manusia, tetapi mewadahi semua potensi, inovasi dan kreativitasnya. Kesejahteraan juga ditebarkan rasa aman dan membebaskan manusia dari intimidasi dan rasa takut, sehingga tidak ada lagi minoritas yang tertindas dan mayoritas dizalimi. Secara menyeluruh makna lambing Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

adalah sebagai berikut: menegakan kebenaran nilai-nilai berdasarkan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kegemilangan dan kejayaan umat dan bangsa.

**Gambar 2.** Partai Keadilan Sejahtera (PKS)



**Tabel 1.** Arti lambang partai

Unsur	Gambar	Makna
Bentuk	Kotak persegi empat	Kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
	Ka'bah	Kesatuan umat
	Bulan sabit	Lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
	Untaian 17(tujuh belas)	Adil, ukhuwah, istiqomah, berani, tegas, dalam mewujudkan kesejahteraan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
Warna	Putih	Bersih, suci, mulia, dan bersih
	Hitam	Aspiratif,kepastian, dan akomodif
	Kuning emas	Kecermelangan, kebahagiaan, dan kejayaan

**e. Struktur Organisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal**

Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu struktur organisasi partai tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdiri, Majelis Syuro, Dewan Syariah, Dewan Pengurus Pusat, dan

Dewan Syari'ah Pusat, sedangkan struktur organisasi tingkat propinsi terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukan pada tingkat propinsi, dalam ruang lingkup kepengurusan tingkat propinsi atau wilayah didirikan struktur organisasi tingkat daerah atau kabupaten/kota yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang kaderisasi atau pembinaan kader, bidang pembangunan keumatan, bidang kebijakan publik dan pengembangan ekonomi kewirausahaan, bidang kepanduan dan olahraga, bidang generasi muda dan profesi, bidang perempuan, bidang kelembagaan sosial, dan Dewan pakar. Struktur atau susunan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Ketua	: Mustofa, S.Pdi
Wakil Ketua	: Amirudin Jamal
Sekretaris	: M. Nuralim
Kerumah Tanggaan Kearsipan	: Zafit Alfaizi
Media dan Humas	: Ir. Adi Wiratmoko
Bendahara	: Arif Budiono
	Yeni Priatnasari
Bidang Pembinaan Kader	: Amar Syamsi, Lc
Bidang Pembangunan Keumatan	: Toto Waryanto, SIP
Bagian Dakwah 1	: Teguh Rusyanto, S.PdI

Bagian Dakwah 2	: Habib Junaidi
Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Ormas	: Ihya
Bagian Jaringan Kelembagaan perempuan	: Ike Amelia
Bidang Kebijakan Publik dan Pengembangan Ekonomi Kewirausahaan	: M. Yahya
Bagian Pengembangan Ekonomi Kewirausahaan	: M. Supriyanto
Bagian Kesra 1	: Fachrodin
Bagian Kesra 2	: Dody MP
Bidang Kepanduan dan Olahraga	: Tikwanto
Bagian kepanduan	: Wigiyanto
Bagian olahraga	: Eko Budiarto
Bidang Generasi Muda dan Profesi	: Araf Hakim
Bagian Kepeloporan Mahasiswa	: Solahudin
Bagian Kepeloporan Pemuda dan Tunas Bangsa	: Nur Priyanto
Bagian Jaringan Buruh, Tani, dan Nelayan	: Abu Hasan S, S.Ag
Bagian Komunitas Hobi, Seni, dan Budaya	: Sahdan Pasaka, S.Pd
Bidang Perempuan atau Kewanitaan	: Ir. Rahmi M
Bagian Ketahanan Keluarga 1	: Siti Arumsih, S.Ag
Bagian Ketahanan Keluarga 2	: Wiwi Wiyanti
Bagian Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan 2	: Zumrotus S
Bidang Kelembagaan Sosial	: Waryo, SHI

Bagian Advokasi Lembaga	: Abdurokhim
Dewan Pakar	: Suherman, SE
Dewan Pakar	: Komarudin, ST
Dewan Pakar	: Musmar L, SE

**f. Sarana dan Prasarana Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal**

Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang proses kelancaran dalam kegiatan partai dan penunjang kerja partai. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zafit Alfaizi selaku Bidang Kerumah Tanggan Kearsipan pada hari Sabtu, 2 April 2011 berikut ini:

“Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- 1) Bangunan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdiri dari satu gedung DPD, yang didalamnya terdapat ruangan-ruangan.
- 2) Ruang dan perlengkapan yang ada, terdiri dari: ruang kantor ketua PKS, ruang tamu, ruang pertemuan, tempat sholat, ruang komputer, dan areal paker, sedangkan perlengkapan yang ada yaitu: komputer 3 buah, LCD, *sound system*, *print*, kipas angin, AC, dan meja tenis.
- 3) Kendaraan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terbagi menjadi 3 kendaraan yaitu: mobil untuk inventaris partai, motor untuk ketua umum, dan motor untuk pengurus kerumah tanggan dan kearsipan”.

**2. Upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Rekrutmen Pemilih Pemula di Kabupaten Tegal**

Dalam penelitian ini, dapat ditemukan gambaran mengenai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut anggota pemilih pemula di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten

Tegal yaitu Bapak Muhamad Nuralim pada Senin, 4 April 2011 dapat diketahui bahwa:

“Upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut Anggota Pemilih Pemula di Kabupaten Tegal dibagi melalui dua jalur rekrutmen, yaitu jalur rekrutmen resmi partai (formal) dan jalur rekrutmen partai informal”.

Jalur rekrutmen resmi partai (formal) yaitu dengan melalui jalur-jalur partai yang sudah ditentukan dengan dijabarkan pada program kerja partai dan melalui prosedur-prosedur partai yang telah ditentukan, dimana setiap anggota baru harus melewati proses-proses perekrutan dengan melalui berbagai program-program partai yang ada biasanya dilakukan oleh bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan jalur rekrutmen partai informal yaitu melalui para kader dan simpatisan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus yang dilakukan oleh para kader dan simpatisan sendiri dengan melakukan pemberitahuan kepada Dewan Pengurus Partai, rekrutmen tersebut dapat melakukan personal atau individu langsung dengan cara-cara yang sesuai. Upaya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut anggota pemilih pemula tersebut dibagi menjadi dua jalur yaitu sebagai berikut:

a. Melalui Jalur Resmi Partai (Formal)

1) *Training* atau *Ta'lim* Orientasi Partai (TOP)

*Training* atau *ta'lim* orientasi partai dengan bentuk kegiatan pelatihan bagi calon anggota partai baru, tujuannya memperkenalkan visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bagi calon anggota

partai dan targetnya peserta mengenal visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut beliau, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sistem pengkaderan yang integral. Setiap anggota, mulai dari pemula sampai yang sudah berstatus anggota ahli diwajibkan mengikuti pengajian rutin. Isi kegiatan ini biasanya pengajian, pertemuan rutin dan sebagainya, yang berisikan dengan materi-materi tentang partai, tujuannya sebagai penempatan mentalitas kader, dan perekrutan anggota pemilih pemula.

## 2) *Training* atau *Ta'lim* Rutin Partai (TRP)

*Training* atau *ta'lim* rutin partai dengan bentuk kegiatan pelatihan peningkatan kualitas anggota partai dan targetnya peserta memahami visi, misi dan kiprah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam konstelasi politik nasional. Kegiatan ini diikuti oleh anggota pemula sampai anggota ahli. Biasanya isi dari kegiatan ini adalah menyampaikan program kerja partai yang berhubungan dengan visi-misi partai. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pengurus Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang atau di tingkat kecamatan, tujuannya untuk menjaga persatuan partai antar kader, dan anggota baru atau anggota pemilih pemula.

### b. Melalui Jalur Informal Partai

Upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen pemilih pemula dengan melalui jalur informal menurut Bapak M. Nuralim

“Jalur informal partai dapat melalui kader atau simpatisan, yaitu bisa atas nama kader secara personal atau lembaga yang dimiliki kader secara personal, misalnya kader mempunyai tempat buat kursus komputer, dan dia bisa melakukan kegiatan kursus komputer melalui dia sendiri dengan memberitahukan kepada pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), atau ada kader yang mempunyai bengkel motor atau mobil, maka kader itu bisa melakukan kegiatan pelatihan bengkel dengan memberitahukan kepada pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), dengan sasarannya pemuda-pemuda yang ingin ikut pelatihan dan kursus tersebut. Pada dasarnya setiap kader berhak dan wajib mempunyai organisasi atau kumpulan” (wanwancara Senin, 4 April 2011).

Jalur rekrutmen informal partai yaitu jalur diluar partai yang titik beratnya di tentukan oleh kader dan simpatisan. Letak keberhasilan dari jalur rekrutmen informal yaitu pada kemauan, dan kemampuan setiap kader dan simpatisan untuk melakukan kegiatan rekrutmen anggota baru atau anggota pemilih pemula, serta kreativitas setiap kader dan simpatisan. Dalam mengadakan kegiatan-kegiatan rekrutmen jalur informal harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh kader-kadernya. Rekrutmen informal partai dilakukan dengan melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan visi-misi partai dan kebutuhan yang ada dimasyarakat agar kegiatan tersebut bisa diterima dimasyarakat.

Diantaranya melalui kegiatan-kegiatan, pengajian, pelatihan-pelatihan, seminar, lomba-lomba olahraga, *out-bond*, dan sebagainya. Salah satunya pengajian yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2010, pukul 20.00 WIB yang dihadiri oleh para kader dan untuk masyarakat umum, dan seminar yang berjudul “indahny hari-hariku bersama bunda” yang dilaksanakan pada hari Minggu, 1 Mei 2011 di Gedung

Rakyat Slawi. Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut selain untuk rekrutmen pemilih pemula juga bertujuan untuk pendekatan kepada masyarakat agar anggapan masyarakat terhadap partai politik menjadi baik dan tidak beranggapan partai politik itu kotor.

Setelah adanya upaya tersebut maka perlu adanya cara atau proses melaksanakan upaya-upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal untuk merekrut anggota pemilih pemula agar bisa maksimal, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisasi Bapak Amar Syamsi Lc, pada hari Rabu, 6 April 2011, beliau mengatakan bahwa:

“Cara atau proses upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu ada dua macam, Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS), dan dakwah *tharbiyah*”.

Cara atau proses melaksanakan upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut anggota pemilih pemula agar bisa maksimal, yaitu dengan melalui proses sebagai berikut:

1) Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS)

Gugus tugas dakwah sekolah (GTDS) merupakan salah satu program perekrutan anggota baru dan untuk mengairahkan kader pada dakwah dan tarbiyah. Gugus tugas dakwah sekolah ini sarannya adalah anak-anak sekolah yang sudah berusia 17 tahun dan pemuda-pemuda. Biasanya dilakukan oleh kader yang alumni di sebuah sekolah. bukan semua bentuk kegiatan mengajak masyarakat bergabung ke PKS atau menerangkan kiprah partai dakwah, namun menawarkan bimbingan baca Al-quran atau bimbingan kajian Islam. Masalah nanti

masyarakat akan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tergantung pada diri pribadi masing-masing, dan tidak adanya paksaan.

## 2) Dakwah *Tharbiyah*

Dakwah *tharbiyah* yaitu pengajian yang dilakukan dalam kelompok kecil (*liqqoh*) dan terbatas dengan anggota maksimal 12 orang dengan dipimpin oleh *murobbi* atau pembina. Menjadi aktivis dakwah *tharbiyah* merupakan pilihan sadar yang mentransformasi kepribadian seseorang. Mereka yang terlibat dalam aktivitas dakwah *tharbiyah*, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi mengalami proses transformasi ini, secara mayoritas, untuk tidak mengatakan semuanya. Dakwah *tharbiyah* adalah seruan untuk mengajak kebaikan dalam menegakan kebaikan. Para aktivis mengatakan sekarang masa hidayah, Masa hidayah ini dimaknai dengan kesibukan dalam aktivitas dakwah: berorganisasi, terlibat dalam kepanitian acara-acara keislaman, pembinaan kader, kajian keislaman, demonstrasi-demonstrasi terkait dengan permasalahan umat. Dengan bentuk kegiatannya diskusi dan dialog mengenai isu-isu keislaman: problematika umat, isu-isu fiqih, dan kebijakan dakwah. Dilakukan oleh kader dan bisa simpatisan, sasarannya adalah pemuda-pemuda dan kalangan mahasiswa, tapi tidak semua orang yang ikut dakwah ini adalah telah menjadi anggota partai akan tetapi tergantung pada personal pribadinya.

Wawancara dengan Bapak Sekertaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal yaitu Bapak Muhamad Nuralim pada Senin, 4 April 2011 dapat diketahui bahwa:

“Cara melasaknakan upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merekrut pemilih pemula di Kabupaten Tegal, dengan melaksanakan bentuk nyata dari program-program partai yang secara utuh dan kontinyu, melalui bidang-bidang dalam pengurus partai, misalnya melalui bidang kependuan dan olahraga melaksanakan program pembentukan forum remaja masjid yang dilakukan pada bulan Maret 2009, dengan tujuan terekrutnya kader baru dikalangan remaja masjid, dengan indikator keberhasilan terbentuknya forum remaja masjid”.

Dalam merekrut anggota baru atau pemilih pemula selain dengan program-program partai, kegiatan-kegiatan partai, ada juga metode dan materi yang dipakai dalam proses perekrutan atau merekrut anggota pemilih pemula, dalam wawancara dengan Bapak Amar Syamsi Lc, pada hari Rabu, 6 April 2011, beliau mengemukakan bahwa:

“Materi yang digunakan dalam merekrut anggota pemilih pemula atau anggota baru, terdiri dari Pengenalan Platform Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan memberikan pemahaman Islam yang *ka'fah* dan *syiamulkiyatul* Islam”.

Materi yang digunakan dalam merekrut anggota pemilih pemula atau anggota baru sebagai berikut:

1) Pengenalan Platform Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pengenalan platform Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan proses sosialisasi platform terhadap anggota baru yang nantinya akan dijadikan kader dari partai. Platform Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi,

program, dan sikap partai terhadap persoalan Indonesia. Platform menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai, dan akan menjadikan segenap aset partai disemua sektor kehidupan, yaitu sektor ketiga, sektor publik, dan sektor swasta bekerja secara terintegrasi, kontinyu, fokus dan terarah sehingga sumber daya partai yang terbatas bisa dikelola secara baik untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan secara langsung bisa dirasakan oleh simpatisan, konstituen dan masyarakat pada umumnya (Platform Kebijakan Pembangunan PKS, 2008:xii).

## 2) Visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan cita-cita yang akan dicapai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memotivasi semua kader dalam semangat berda'wah, dan menjadi pegangan setiap kader dan simpatisan dalam melakukan program-program partai.

## 3) Memberikan pemahaman Islam yang *ka'fah* dan *syiamulkiyatul* Islam

Pemahaman Islam yang secara utuh dan tidak terpisah-pisah mengenai islam, dan kesempurnaan ajaran Islam sebagai ajaran Islam yang sempurna, dengan sumber *al-quran* dan *al-hadist*. Pemahaman secara utuh ini akan memahami islam sebagai *rahmtan lil alamin* tidak akan menyesatkan ajaran-ajarannya. Jenis kegiatannya atau materinya yaitu mengenai *aqidah*, *dauroh al'quran*, sejarah Islam, dan sebagainya.

Terkait dengan metode perekrutan atau rekrutmen anggota pemilih pemula, adapun media yang digunakan dalam mendukung pengisian materi tersebut, yaitu sesuai yang telah diamanatkan oleh Anggaran Rumah Tangga PKS dalam BAB II, pasal 4. Sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisasi Bapak Amar Syamsi Lc, pada hari Rabu, 6 April 2011, beliau mengatakan bahwa:

“Media yang digunakan dalam perekrutan atau merekrut anggota pemilih pemula yaitu dengan *LCD*, *Laptop*, brosur, spanduk, Iklan, dan sebagainya”.

Dalam perekrutan atau merekrut anggota pemilih pemula di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, apa ada syarat yang ditentukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, melalui wawancara dengan Bapak Muhamad Nuralim Sekertaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal yaitu, pada Senin, 4 April 2011 dapat didapat jawaban yaitu:

“Tidak ada syarat yang ditentukan, syaratnya adalah mau, bagaimana Rosulallah SAW, dalam mengajak kebaikan itu sendiri, beliau mengajak siapa pun untuk menegakan kebaikan, karena itu PKS yang berasaskan Islam dan partai dakwah mengajak semua orang siapa saja untuk ikut, dan tanpa kecuali baik muslim maupun non muslim untuk bergabung dalam menegakan kebaikan”.

Menurut Bapak Mustofa Ketua Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal yang diwawancarai pada Kamis, 7 April 2011, beliau mengatakan:

“Tidak ada strategi khusus dalam merekrut pemilih pemula, tapi karena PKS partai dakwah maka intinya melalui dakwah dan

melalui mengaji dan mengaji dengan melalui anggota-anggota kader dan simpatisan yang memiliki kemampuan untuk memberikan materi. Mengaji biasanya dilakukan setiap hari dan tempatnya secara bergantian untuk tiap kader dan simpatisa”.

Dengan ketidak adanya syarat dalam perekrutan anggota baru atau pemilih pemula maka pada hakikatnya semua orang bisa untuk direkrut menjadi anggota pemilih pemula. Proses rekrutmen anggota pemilih pemula dapat dilakukan semua kader dan simpatisan, bagi pemilih pemula yang non Islam mereka masuk partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanpa adanya paksaan, dan keterarikan terhadap program-program partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak membeda-bedakan jenis agama, walaupun pada umumnya PKS berbasis Islam, dan yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Bapak Amar Syamsi Ketua Bidang Kaderisasi, pada hari Rabu, 6 April 2011, dihasilkan informasi bahwa

“Proses merekrut pemilih pemula dengan misi pemilih pemula, menurut *segman*, sosialisasi, program kerja partai, dan dakwah, selain itu juga tiap bidang atau kumpulan bidang-bidang mengadakan pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan misalnya pecinta alam dan sebagainya”.

Tujuannya untuk mendapatkan anggota baru, kegiatan ini diisi dengan materi-materi, kemudian dalam kegiatan tersebut akan kelihatan mana anggota yang loyal dan mempunyai *skill* dia akan dipantau selama ± 3 bulan berkomunikasi, diajak terus dalam kegiatan setelah itu dia diajak dengan melalui pertemuan rutin partai untuk dapat mengetahui visi dan misi partai dan terus mengadakan sillaturohmi dan tempatnya

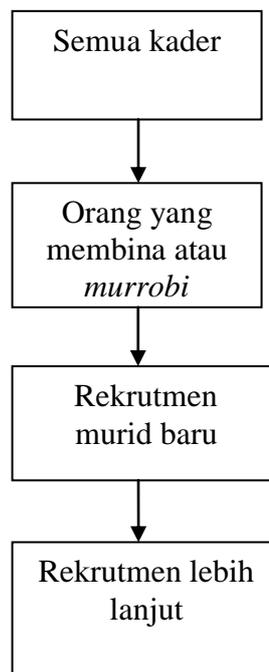
pindah-pindah tergantung situasi dan kondisi dari situlah akan terlihat seorang anggota pemilih pemula (seleksi alam) yang mempunyai *skill* dan benar-benar loyal terhadap partainya, dari situlah seorang anggota pemilih pemula akan dijadikan kader partai dengan melalui *training* atau *ta'lim* orientasi partai (TOP) dan *training* atau *ta'lim* rutin partai (TRP), sesuai yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bab III, pasal 5 ayat 2, yang bunyinya:“setiap anggota sebagaimana dimaksudkan pada ayat I harus terdaftar dan memiliki kartu tanda anggota parati, terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian, mengikuti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepartaian, serta dinyatakan lulus untuk masing-masing jenjang”, setelah melakukan yang disebut di atas anggota baru atau pemilih pemula diwajibkan untuk mengikrarkan janji (ART pasal 6 ayat 1), ikrar janji tersebut berbunyi “saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah dan *Sunnah* Rasul-Nya, komitmen kepada visi, misi dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan kewajiban anggota partai sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan peraturan partai lainnya semaksimal mungkin, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal partai kepada lembaga, pihak ataupun orang perorangan di luar partai. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustofa, S.PdI, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, pada Kamis, 7 April 2011, beliau mengatakan bahwa:

“Proses rekrutmen anggota pemilih pemula yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal yaitu dilakukan dengan personal artinya seseorang yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diharapkan nantinya akan mengajak masyarakat lain untuk ikut kegiatan-kegiatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tanpa adanya paksaan”.

Proses rekrutmen pemilih pemula dapat dilakukan dengan model perekrutan sebagai berikut.

**Gambar 2.** Alur proses rekrutmen pemilih pemula.



Berawal dari filosofi partai dakwah yang mengajak kebaikan dengan tujuan pembentukan muslim yang tangguh iman dan bertaqwa. semua kader dalam proses perekrutan berhak merekrut pemilih pemula,

atau mempunyai perkumpulan atau pengajian dalam menyampaikan dakwah dari situlah maka dia akan menjadi orang yang membina atau *murrabi* (pembina) yang memimpin atau guru mengaji dalam melaksanakan dakwah, harapan dari seorang *murabbi* adalah nantinya ada seorang atau lebih, dari perkumpulan atau pengajian tersebut ada yang memiliki sikap mendidik dan bisa menjadi *murrabi*, dari situlah maka nantinya bisa merekrut dan membina anggota baru, yang nantinya akan dididik dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di partai atau dalam istilah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal adalah *Liqqoh* atau pengajian kecil.

### **3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Rekrutmen Pemilih Pemula di Kabupaten Tegal**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, maka untuk mengetahui faktor yang mendukung Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, yang sesuai dikemukakan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, Bapak Mustofa, S.Pdi yaitu pada wawancara hari Kamis, 7 April 2011 beliau mengatakan bahwa:

“sesuai dengan realita di lapangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal didukung dan dibawa oleh masyarakat terpelajar, akademisi sehingga perkembangan dalam pengorganisasian sangat cepat, antusias masyarakat semakin besar dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Dewan pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, kerja keras para kader dan simpatisan yang terus menerus tanpa mengenal lelah memberikan kontribusi terbaik untuk generasi

muda atau masyarakat Kabupaten Tegal agar bisa membuat manusia-manusia yang amanah, baik dengan Tuhan maupun sesama manusia”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhamad Nuralim Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, pada Senin, 4 April 2011, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor yang mendukung Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal untuk merekrut anggota pemilih pemula yaitu bahwa setiap kader dan simpatisan menjunjung tinggi persatuan dan menghormati perbedaan, dan loyalitas setiap kader dan simpatisan yang tinggi sehingga menjaga eksistensi partainya”.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan pegurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal pada hari Kamis, 7 April 2011, bahwa faktor yang menghambat antara lain:

“Berasal dari eksternal partai dikalangan masyarakat masih ada anggapan bahwa partai politik itu kotor sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah (image negatif masyarakat), ketika ingin merekrut masyarakat, banyak masyarakat bertanya mau dibawa kemana, bila ke partai, masyarakat menganggapnya bahwa partai harus membutuhkan uang, kalau udah berbicara partai itu didalamnya ada persaingan, lawan politik yang sering melakukan *black campaign*, masyarakat masih sulit untuk menerima kegiatan dakwah, masih adanya sikap pragmatis dari masyarakat pada setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena masyarakat sangat sulit untuk diberikan panduan akan pentingnya berpolitik demi kemajuan kinerja pemerintah”.

Faktor internal yang dialami Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, yaitu kemampuan dan kemauan para kader masih rendah untuk merekrut pemilih pemula, kurangnya rasa percaya diri pada setiap kader, banyak kader yang hanya ikut kegiatannya saja tapi tidak mau merekrut pemilih pemula, banyak

kader yang aktif atau berkompeten, dan ada juga yang tidak, dari segi ekonomi kader masih banyak yang dibawah penghasilan umumnya sehingga kesibukan partai dan pekerjaan akan terganggu untuk merekrut anggota pemilih pemula, miskin tokoh sehingga sangat sulit untuk mempengaruhi atau menghalaqohnya, dan kebanyakan pemuda yang membina, sehingga apabila merekrut menemui pemilih pemula mereka akan minder atau tidak percaya diri.

**4. Solusi yang Dilakukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Untuk Menghadapi Hambatan Dalam Rekrutmen Pemilih Pemula**

Solusi dilakukan untuk memecahkan suatu masalah tanpa adanya konflik, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, dan wawancara dengan pimpinan partai dan pengurus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, solusi yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal untuk menghadapi hambatan dalam merekrut anggota pemilih pemula yaitu, sosialisasi, dengan program nyata atau riil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat, pelatihan dan penigkatan kualitas kader, pendekatan dan pelatihan dengan masyarakat setempat dan membangun komunikasi dengan semua golongan atau kelompok masyarakat, dan dibuktikan dengan kerja dan kegiatan.

## **B. Pembahasan**

Partai politik pada hakekatnya adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Menurut Firmanzah (2008:72), Program politik sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional, dan terkait-baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam merebutkan pengaruh dan perhatian publik. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi, yaitu program Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal dalam merekrut pemilih pemula yaitu melalui program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga masyarakat diharapkan akan tertarik pada program tersebut yang telah dijabarkan dalam bentuk kegiatan, contohnya pelatihan-pelatihan, pengajian rutin, dan kegiatan-kegiatan partai lainnya.

Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa partai-partai politik khususnya di negara-negara berkembang memainkan peran penting dalam menciptakan budaya politik di negara tersebut. Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader juga memproklamirkan sebagai partai dakwah, namun apa yang dimaksud dengan partai kader dalam kenyataan atau buku lainnya yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ada penjelasan rinci dan lebih lanjut juga tidak dituangkan pada suatu falsafah dasar partai. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu partai yang berasaskan Islam (agamis) dengan menggunakan metode da'wah dalam

mencari dukungannya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki visi-misi, dalam visi umum “sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.”

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sigmund Neuman dalam karangannya *modern political*, dalam bukunya Miriam Budiarjo(2008:404), bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk kekuasaan pemerintahan serta dukungan rakyat atas persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti jelas bahwa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan partai kader murni, tetapi kombinasi antara partai dan partai massa, karena ada ciri yang diberikan bagi partai kader tidak sesuai dengan kondisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Pertama*, salah satu ciri partai partai kader merupakan orang-orang terkemuka yang disegani secara politik, para aktivis didalamnya adalah mereka yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) para aktivisnya tidak banyak yang mempunyai pengaruh dimasyarakat kecuali untuk kelompok kecilnya, bahkan sebagian tidak dikenal oleh masyarakat. *Kedua*, ciri partai massa yaitu berupa dukungan yang besar dari pendukungnya atau mengutamakan kekuatan jumlah anggotanya atau pendukungnya, oleh karena itu biasanya datang dari berbagai aliran-lairan politik dari masyarakat yang sepakat bernaung di bawahnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru sebaliknya mereka membutuhkan jumlah anggota

atau pendukung dalam mengeksistensikan partainya, dimana dukungan masyarakat sangatlah perlu dalam menjaga hal tersebut, akan tetapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mencari dukungan atau merekrut anggota baru atau masyarakat dengan menggunakan metode dakwah dan dengan bentuk-bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan tujuan pendekatan kepada masyarakat, tanpa disadari masyarakat bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu upaya untuk merekrut anggota baru atau pemilih pemula dalam masyarakat, tetapi dikemas dalam bentuk kegiatan tersebut, sehingga tidak tampak bahwa itu adalah salah satu rekrutmen atau mencari dukungan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Anis Matta Sekjen Jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan gabungan antara apa yang disebut *nukhawiyah jamahiriyah*, (gerakan elit dan massa). Pijakan yang melandasi *nukhawiyah jamahiriyah* adalah proses kebangkitan umat islam kembali memerlukan kualifikasi kepemimpinan kolektif dalam umat ini. Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memegang prinsip pemimpin akan bagus kalau dia dukung oleh basis massa yang kuat. Jika hubungan antara elit dengan massa pendukungnya mempunyai hubungan yang kuat, sehingga tidak mudah nanti korelasi elit dan massa ini diputus oleh sebuah konspirasi politik, karena pada suatu ketika dalam proses penyelenggaraan negara bisa menghadapi tantangan dalam berbagai bentuk (Partaipolitik-sejarahpks.2002.[http://www. Kompas. com](http://www.kompas.com). diakses pada 13:15, 5 Maret 2009).

Hal ini sesuai klasifikasi partai, Budiardjo (2004:166), mengatakan bahwa klasifikasi partai bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, sedangkan partai kader mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja anggota-anggotanya, pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik memiliki peran dan fungsi. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Budiardjo (2004:164), mengatakan salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik dalam fungsi ini adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin, menurut Bapak Mustofa, S.PdI ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, mengatakan bahwa, rekrutmen dilakukan untuk menjaga kesulitan partai dan mencari calon pemimpin partai. Rekrutmen politik dilakukan pada golongan muda untuk didik menjadi kader dan dari para kader ini akan tampak anggota-anggota yang mempunyai *skill* dan loyal terhadap partai akan dijadikan calon pemimpin, dengan melalui ketentuan yang ditetapkan oleh partai. Sebagai

partai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih mementingkan kekuatan organisasi partai dan kedisiplinan kader dalam bekerja, setiap kader memikul tugas yang sama yaitu dengan merekrut anggota baru atau pemilih pemula.

Peran Pengurus dan kader sangat penting dalam melakukan rekrutmen terhadap anggota pemilih pemula atau anggota baru, semakin baik kinerja pengurus dan para kader maka akan menghasilkan yang maksimal dalam merekrut anggota pemilih pemula atau anggota baru. Partai yang mempunyai paham demokratis akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para warga negara untuk masuk menjadi anggota partai. Partai yang mempunyai tajam demokratis ini dalam merekrut anggotanya juga melalui persaingan dengan partai-partai lainnya yang terdapat di masyarakat atau negara tersebut.

Rekrutmen adalah proses mencari anggota baru yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pola. Cara dan pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi atau lembaga bersangkutan. Edward (2006:18), pola rekrutmen yang diterapkan gerakan tarbiyah mulai dari rekrutmen individu (rekrutmen *fardi*), yaitu rekrutmen satu atau dua orang anggota dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau rekomendasi *murrobbi*. Di samping juga terbuka peluang untuk melakukan rekrutmen kolektif (rekrutmen *jama'i*), rekrutmen ini dilakukan baik sarana formal maupun informal. Rekrutmen *jama'i* terutama melalui

rekrutmen kepartaian, organisasi massa maupun organisasi agama tertentu, untuk pola rekrutmen kepartaian dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat melalui formal kepartaian untuk menjadi anggota atau kader maupun simpatisan, menurut Bapak Muhamad Nuralim Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Kabupaten Tegal, mengatakan bahwa, Jalur informal partai dapat memalui kader atau simpatisan, yaitu bisa atas nama kader secara personal atau lembaga yang dimiliki kader secara personal, misalnya kader mempunyai tempat buat kursus komputer, dan dia bisa melakukan kegiatan kursus komputer melalui dia sendiri dengan memberitahuan kepada pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), atau ada kader yang mempunyai bengkel motor atau mobil, maka kader itu bisa melakukan kegiatan pelatihan bengkel dengan memberitahuan kepada pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), dengan sasarnya pemuda-pemuda yang ingin ikut pelatihan dan kursus tersebut. Pada dasarnya setiap kader berhak dan wajib mempunyai organisasi atau kumpulan.

Jalur informal ini dapat dikatan rekrutmen informal dimana rekrutmen fard'i (rekrutmen personal) dilakukan oleh setiap kader dan simpatisan untuk merekrut anggota baru atau pemilih pemula. selain itu dengan adanya program kerja dan kegiatan-kegiatan partai yang dihadiri oleh masyarakat umum, nantinya diharapkan dari kegiatan tersebut akan setiap orang yang menghadiri (personal) akan mengajak masyarakat lain baik itu teman, keluarga, maupun masyarakat lain untuk menghadiri kegiatan tersebut, dari

situlah diharapkan individu-individu tersebut akan tertarik dan bergabung dengan partainya, baik menjadi kader maupun simpatisan.

Rekrutmen *jama'i* dapat dilakukan dari penjelmaan dari program partai menjadi kegiatan-kegiatan konkrit yang sesuai dengan kebutuhan partai. Rekrutmen *jama'i* melibatkan anggota masyarakat luas sehingga harus melalui kegiatan formal kepartaian, dalam hal ini setiap kegiatan harus ada tujuan dan sasarnya agar nanti dalam merekrut anggota baru atau pemilih pemula menjadi mudah. Rekrutmen *jama'i* dengan melalui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perekrutan. Setiap anggota baru yang akan menjadi kader harus melalui *Training* atau *Ta'lim* orientasi Partai (TOP) dan *Training* atau *Ta'lim* Rutin Partai (TRP) yang dilakukan dalam rangka merekrut anggota baru dalam kapasitas besar.

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang N0.10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara setelah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merekrut anggota pemilih pemula adalah dengan peningkatan kemampuan diri dari para kader dengan melihat latar belakang

pendidikannya baik formal maupun nonformal, karena kualitas partai kader terletak pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Ukuran kualitas sumber daya manusia terletak pada kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas, menghilangkan sikap budaya primordialisme yang membelenggu, rasionalitas dan keterbukaan, koordinasi perjenjangan kader untuk menyelesaikan suatu masalah baik sifatnya rutin maupun yang sifatnya insidental, dan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau masyarakat, dinas-dinas, lembaga-lembaga, ormas-ormas, dan sebagainya untuk diadakan kerja sama dalam merekrut anggota baru atau pemilih pemula, membangun komunikasi dengan segala kalangan masyarakat, dan dibuktikan dengan kerja partai dan kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai politik yang berada di Kabupaten Tegal telah menjalankan salah satu fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, kepada warga negara yang telah mempunyai hak menurut peraturan, untuk menjadi anggota partai. Penjabaran rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui dua jalur atau sarana yaitu sarana formal maupun informal, dengan menggunakan medianya adalah media cetak, media elektronik serta media komunikasi lainnya.
2. Pelaksanaan rekrutmen pemilih pemula atau anggota baru yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan, pelaksanaan rekrutmen dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya berhubungan partai, yaitu dengan pelatihan-pelatihan, pengajian, seminar, dauroh, dialog, dan pertemuan lainnya, namun pendekatan yang lebih ditekankan adalah personal, hal ini untuk menguatkan komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melaksanakan rekrutmen pemilih pemula di Kabupaten Tegal diantaranya:
  - a. Faktor yang berasal dari eksternal partai, dikalangan masyarakat masih ada anggapan bahwa partai politik itu kotor sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah (image negatif masyarakat), ketika ingin merekrut masyarakat, banyak masyarakat bertanya mau dibawa kemana, bila ke partai, masyarakat menganggapnya bahwa partai harus membutuhkan uang, kalau udah berbicara partai itu didalamnya ada persaingan, lawan politik yang sering melakukan *black campaign*, masyarakat masih sulit untuk menerima kegiatan dakwah, masih adanya sikap pragmatis dari masyarakat pada setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena masyarakat sangat sulit untuk diberikan panduan akan pentingnya berpolitik demi kemajuan kinerja pemerintah.
  - b. Faktor yang berasal dari internal partai kemampuan dan kemauan para kader masih rendah untuk merekrut anggota pemilih pemula, kurangnya rasa percaya diri pada setiap kader, banyak kader yang hanya ikut kegiatannya saja tapi tidak mau merekrut anggota pemilih pemula, banyak kader yang tidak aktif atau tidak berkompeten, dari segi ekonomi kader masih banyak yang dibawah penghasilan umumnya sehingga kesibukan partai dan

pekerjaan akan terganggu dalam merekrut pemilih pemula, miskin tokoh sehingga sangat sulit untuk mempengaruhi atau menghalaqohnya, dan kader kurang rasa percaya diri dalam merekrut pemilih pemula.

4. Solusi yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal untuk menghadapi hambatan dalam rekrutmen anggota pemilih pemula yaitu, sosialisasi, dengan program nyata atau riil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat, pelatihan dan peningkatan kualitas kader, pendekatan dengan masyarakat setempat dan membangun komunikasi dengan semua golongan atau kelompok masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai politik lain, untuk senantiasa meningkatkan peran dan fungsinya, meningkatkan kualitas para kader dan simpatisan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk menjadi anggota partai agar bisa berpartisipasi aktif dalam dunia politik.

2. Partai politik benar-benar melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam kontrak politik, sehingga masyarakat mempunyai sikap aktif terhadap partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Althof, Phlip & Rush, Michael. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ansori, Hendri. 2003. peranpartaipolitik.<file:///J:/politik/peran-partai-politik.html>. (00.30. 20 Jan 2010).
- Budiarjdo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjdo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Demografi.<http://www.tegal.go.id/page/demografi>.diakses pada 11:44, 26 Februari 20110).
- Edward, Djony. 2006. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Fadjar,Muktie. 2008. *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: In-Transpublishing.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik (komunikasi dan positioning ideologi politik diera demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Liberty
- Kamarudin. 2003. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 Untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Versi Publishing.
- Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Mandar Maju
- Jumlah\_pemilih\_pemula\_kabupatentegal. <http://www.kpu-kabupatentegal.or.id>. diakses pada 12:59, 19 April 2009).
- Majelis Pertimbangan Pusat PKS. 2008. *Memperjuangkan masyarakat madani*. Jakarta: MPP PKS.

- Miles, Methew B & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Onghokham. 1995. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Partai\_keadilan\_sejahtera. <http://id.wikipedia.org/> 2011. diakses pada 12:13, (16 Februari 2011).
- Partaipolitik-sejarahpks.2002. [http://www. Kompas. com](http://www.kompas.com). diakses pada 13:15, (5 Maret 2009).
- Philipus, Ng & Aini, Nurul. 2004. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Raga Maran, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sandikota. 1999. *Pertarungan untuk Sebuah Tahta Presiden dan Agenda Reformasi*. Jakarta: Sandikota
- Sejarahpks.2008. [www. Pk-sejahtera.or/sejarah pks. Or](http://www.pk-sejahtera.or/sejarah_pks.Or). Diakses

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bagian Depan Kantor DPD PKS Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Mustofa, S.PdI  
Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak M. Nuralim  
Sekretaris DPD PKS Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Amar Syamsi Lc  
Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Tegal